



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018–2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaatnya, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.

6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka Panjang Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.
8. Pengoperasian adalah uji operasional atau suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.
9. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
10. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disebut RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
11. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
12. Roadmap Penguatan SIDA adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA; dan rencana aksi penguatan SIDA.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen arah kebijakan perencanaan pembangunan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program perencanaan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) RIK dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan di berbagai lembaga kelitbangan di Kota guna peningkatan kualitas kebijakan berbasis kelitbangan.
- (2) RIK ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kota.

BAB II  
SISTEMATIKA DAN TATA CARA PENYUSUNAN RIK

Pasal 3

- (1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang kelitbangan memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. gambaran umum kelitbangan;
  - c. arah kebijakan kelitbangan;
  - d. strategi pelaksanaan; dan
  - e. penutup.
  
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian;
  - b. pengembangan;
  - c. pengkajian;
  - d. perekayasaan;
  - e. penerapan;
  - f. pengoperasian;
  - g. evaluasi kebijakan; dan
  - h. roadmap penguatan SIDA.
  
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  
- (4) Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membangun basis data inovasi daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan;
  - c. membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan; dan
  - d. membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar Lembaga.

BAB III  
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Kota yang bersifat mendasar.

BAB IV.....

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide dan/atau informasi.
- (3) Data, gagasan/ide dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUNUTP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 66  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 66/KPTS/BPP-LITBANG/2020  
TENTANG RENCANA INDUK  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

Kota Palembang memiliki luas mencapai 400.61 km<sup>2</sup>. Memperhatikan kondisi tersebut berbagai pelayanan dengan rentang kendali yang dekat dengan masyarakat. Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 Kelurahan, kehadiran pemerintahan paling bawah diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Letak Kota Palembang menjadi penting dalam melihat keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi ibu kota provinsi, kota Palembang diharapkan mampu memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi masyarakatnya. Pada saat ini, Jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2018 dengan total 1.643.488 jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 824.086 Jiwa dan perempuan sebanyak 819.402 Jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 433.545 Keluarga.

Penduduk Kota Palembang pada kelompok produktif menjadi pekerja yang berada pada setiap sektor lapangan kerja yang tersedia. Penduduk yang termasuk pada angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 742.346 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 451.984 dan perempuan sebanyak 290.362. sedangkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 53.545 orang. Jumlah penduduk yang menanggung hanya mencapai 3,25 % dari total jumlah penduduk kota Palembang. Artinya pengangguran tersebut dapat dibilang masih rendah, hal ini menjadi keuntungan bagi Kota Palembang guna menyediakan berbagai program yang menjadikan jumlah pengangguran tersebut sebagai target pembangunan dengan intervensi tertentu yang tepat.

Kota Palembang secara keseluruhan hingga September 2019 jumlah anak putus sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Kota Palembang adalah sebanyak 1.278 anak. Dengan rincian untuk Sekolah Dasar sudah mencapai 99,6%, dan jenjang SMP baru mencapai 69,9%, atau sekitar 31,1% anak di Palembang usia Sekolah Menengah Pertama mengalami putus sekolah. Sementara untuk SMA dan SMK sudah mencapai 70,8% atau 29,2% anak usia SMA mengalami putus sekolah di Palembang. Hal tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palembang dengan memberikan fokus pada pelayanan dasar dengan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi yang memiliki tugas mengelola urusan pemerintah Pendidikan tingkat atas.

Selain capaian IPM yang terukur pada tingkat tinggi sebagai Pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Palembang mencapai 179,32 ribu orang (10,95 persen). Berkurang sebesar 5,09 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 184,41 ribu orang (11,40 persen). Kondisi ini menjadi target pemerintah Kota Palembang guna mencari cara inovatif dalam menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi seperti yang dicanangkan angka kemiskinan satu digit.

Kelitbangan Kota Palembang menggunakan berbagai informasi terkait dengan kependudukan dan kondisi wilayah guna kesesuaiannya pada rancangan berbagai agenda kegiatan. Kota Palembang memiliki potensi dan modal yang cukup dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pembangunan dengan target penduduk dan juga investasi yang tercipta. Kapasitas penduduk serta potensi wilayah yang dimiliki Kota Palembang menjadi modal dalam memilih berbagai program guna memberdayakan dan menyelaraskan kehidupan masyarakatnya

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Palembang sebuah Kawasan yang memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat dengan ketersediaan berbagai layanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. layanan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota Palembang dengan berpedoman pada kriteria tertentu. Tidak berhenti pada pemberian pelayanan saja, arti Kawasan perkotaan memiliki berbagai tantangan perekonomian, sosial, dan pembangunan di dalamnya. Berbagai pendekatan dalam pembangunan diupayakan guna menupayakan keberhasilan dan pemenuhan taraf hidup masyarakat perkotaan. Penguasaan permasalahan pembangunan penting guna menentukan berbagai langkah strategis kelitbangan dalam memenuhi tuntutan pembangunan.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan dalam membangun wilayah kota-kota yang terjadi selama ini. Selain itu, pengelolaan Kawasan juga menjadi isu-isu pembangunan pada kota yang ada. Hal tersebut menjadi target kinerja pemerintah Kota Palembang guna mengupayakan pencapaian itu dalam memiliki akses dan dampak yang baik guna peningkatan taraf hidup masyarakat perkotaan. Untuk mengakselerasi kinerja tersebut, tentunya membutuhkan berbagai strategi dengan pendekatan inovatif yang memiliki dampak terhadap perekonomian dan efektifitas pembangunan. Akselerasi kinerja pemerintah tersebut didapat dengan pemanfaatan pengetahuan guna perekonomian (*knowledge base-economy*).

Kota Palembang bergerak maju dalam memberikan pelayanan serta berbagai kebutuhan masyarakat didasarkan dengan pemilihan berbagai kebijakan yang inovatif. Pergerakan tersebut tentunya membutuhkan berbagai tindak dan motif berbasis pengetahuan dari hasil kelitbangan yang tepat guna. Berbagai tindakan tersebut menjadi sebuah program kelitbangan yang terencana dengan baik dan dapat diukur secara tegas.

Kelitbangan sebagai instrument yang berbasis penciptaan pengetahuan baru untuk pencapaian berbagai kerja pemerintah. Instrument berbentuk inovasi dan kebijakan yang mengerakan penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan dayasing dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Kelitbangan membantu pemerintah guna pemenuhan berbagai pencapaian target sasaran pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya pengetahuan serta kolaborasi kerja sebagai tulang punggungnya.

Penciptaan langkah strategis tersebut didukung dengan berbagai kegiatan yang menggunakan pengetahuan di dalamnya dengan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelitbangan Kota Palembang merupakan satu upaya guna menjadi landasan awal bagi setiap agenda pembangunan yang terinstitutionalkan. Untuk itu, perlunya penyusunan rencana sistematis dengan menitikberatkan kepada agenda pemerintahan, sosial, ekonomi dan inovasi. Rencana induk kelitbangan Kota Palembang menjadi rencana partisipatif guna penggunaan pengetahuan. Rencana induk kelitbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dapat mengenali berbagai agenda kelitbangan dengan memanfaatkan Rencana induk Kelitbangan yang disusun dengan pendekatan perencanaan fungsional. Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang nantinya memetakan berbagai kebutuhan penciptaan pengetahuan serta inovasi dengan target sasaran keluaran berupa kebijakan, kerangka kerja inovasi, dan naskah regulatif guna mendukung pemberian layanan, dan daya saing daerah.

Pemanfaatan kelitbangan juga melibatkan penggunaan berbagai sumberdaya intelektual yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Rencana induk kelitbangan tersebut menjadi instrumen akselerasi dalam pencapaian berbagai target kinerja pemerintah daerah. Penguasaan intelektual tersebut menjadi sumberdaya yang terus ditemukan guna memenuhi kebutuhan pembangunan dengan berbagai strategi yang inovatif guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Rencana Induk Kelitbangan disusun guna memanfaatkan menyelenggarakan kelitbangan secara sistematis. Berbagai agenda yang tersusun dalam Rencana tersebut diiharapkan menjawab berbagai permasalahan guna berbagai upaya menyeluruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, rencana induk kelitbangan juga mengelaborasi berbagai aspek pembangunan serta instrument yang dibutuhkan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kelitbangan menproyeksikan berbagai agenda antisipatif guna merespon berbagai perubahan yang terjadi pada tingkat masyarakat.

Kelitbangan berbasiskan fungsi menghasilkan pengetahuan sesuai dengan kearifan lokal. Kehadiran kelitbangan tidak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi Kota Palembang. Pembangunan sosial berbasis kelitbangan diarahkan guna penciptaan berbagai agenda memperkecil berbagai kesenjangan yang terjadi dalam wilayah. Agenda tersebut termasuk didalamnya strategi inovasi sosial yang dapat dimanfaatkan.

Pemerintahan daerah yang berkualitas ditopang dengan kemampuan menghasilkan inovasi dari hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan wilayah serta masyarakat. penggunaan kelitbangan yang terencana dengan baik menghasilkan keselarasan dalam pendekatan serta paradigma dalam berbagai program pembangunan dan penguatan terhadap kinerja pemerintah Kota Palembang.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

- dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 03);

### 1.3. Tujuan Dan Sasaran

#### 1.3.1. Tujuan

Penyusunan Rencana Induk penelitian dan pengembangan menjadi acuan guna akelerasi penguatan daya saing daerah berbasis pengetahuan guna pemenuhan tuntutan kinerja pemerintah Kota Palembang dan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.3.2. Sasaran

Adapun Sasaran dari Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang adalah:

1. Menjadi landasan strategik pada kemilikan agenda kebijakan yang berkualitas melalui hasil kelitbangan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang berasal dari pemanfaatan hasil kelitbangan dalam mendukung pembangunan kota yang berdayasaing.
3. Arah penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif guna jaminan dayasaing daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan pada Kota Palembangn memiliki sistematika yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab 1. Pendahuluan. Bab ini terdiri dari :

1. Latar Belakang, menguraikan padangan umum secara singkat terkait dengan rencana induk kelitbangan Kota Palembang.
2. Dasar Hukum, berbagai regulasi peraturan yang erat menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
3. Tujuan dan Sasaran, menguraikan frase tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang
4. Sistematika Penulisan, menjelaskan pembabpan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.

Bab 2. Gambaran Umum Penelitian dan Pengembangan, dibagi kedalam:

1. Gambaran Umum Wilayah, menguraikan berbagai kondisi pencapaian pembangunan dan kinerja pemeritah Kota Palembang saat ini.
2. Kondisi sumberdaya kelitbangan, mengurikan berbagai kondisi terkini dari kelembagaan, pengelolaan kelitbangan, pendanaan serta berbagai langkah kerjasama kelitbangan yang hendak dilakukan
3. Potensi dan Permasalahan, mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan di Kota Palembang guna dijadikan landasan inisiatif dari kelitbangan yang akan dilakukan.
4. Peluang dan tantangan, memilih berbagai peluang dan tantangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan tercipta dari aktivitas pemerintah, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya.

Bab 3. Arah Kebijakan Kelitbangan, merumuskan kebijakan kelitbangan dimulai dari perumusan, antara lain:

1. Arah kebijakan pembangunan daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan daerah, visi dan misi
2. Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah, yang menguraikan arah kebijakan dan strategi
3. Indikasi program prioritas kelitbangan daerah, yang menjelaskan program prioritas bidang tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik, program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan, program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan serta program prioritas bidang inovasi dan pengembangan IPTEK.

Bab 4. Strategi Pelaksanaan, menjelaskan antara lain:

1. Kelembagaan yang menguraikan bentuk koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan
2. Evaluasi Pelaksanaan, menjelaskan evaluasi guna menjaga konsistensi pencapaian berbagai program/kegiatan dalam rencana Induk Kelitbangan.

Bab 5. Penutup

Menguraikan secara singkat tentang pemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan dalam mendukung berbagai kebijakan dan inovasi daerah.

BAB II  
GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Secara umum Kota Palembang memiliki luas mencapai 400.61 km<sup>2</sup>. Memperhatikan kondisi tersebut berbagai pelayanan dengan rentang kenadli yang dekat dengan masyarakat. Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 Kelurahan, kehadiran pemerintahan paling bawah diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. penyelenggaraan pemerintahan Kota Palembang dengan berbasis kelitbangan mengupayakan penciptaan berbagai kinerja kelitbangan yang menghadirkan inovasi dan regulasi yang bermuara pada penyelesaian permasalahan di masyarakat.

2.2. Letak dan Kondisi Wilayah

Letak Kota Palembang menjadi penting dalam melihat keberhasilan pembangunan di Kota Palembang. Menjadi ibu kota provinsi, Kota Palembang diharapkan mampu memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi masyarakatnya. Pada saat ini, jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2019 dengan total 1.662.893 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 834.175 jiwa dan perempuan sebanyak 828.718 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 433.698 Keluarga. Adapun penjelasan tiap kecamatan disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 1.1  
Penduduk dan Luas Wilayah Kota Palembang

No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
			Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ilir Barat II	7	36.696	36.573	73.269	23.637	6,220
2.	Gandus	5	33.455	32.327	65.782	22.300	68,789
3.	Seberang Ulu I	5	47.496	46.626	94.112	16.079	8,280
4.	Kerapati	5	46.853	45.231	92.084	31.847	9,160
5.	Jakabaring	6	47.173	46.098	93.271	13.601	42,560
6.	Sebrang Ulu II	7	53.897	53.204	107.101	45.180	10,690
7.	Plaju	7	45.416	45.318	90.734	21.227	15,170
8.	Ilir Barat I	6	70.675	70.869	141.544	22.670	19,770
9.	Bukit Kecil	6	24.719	25.582	50.301	8.737	9,920
10.	Ilir Timur I	11	38.646	40.622	79.268	10.660	6,500
11.	Kemuning	6	46.938	47.059	93.997	31.541	9,000
12.	Ilir Timur II	6	47.897	48.066	95.963	27.623	10,820
13.	Kalido	5	56.899	56.033	112.932	36.593	27,920
14.	Ilir Timur III	6	43.495	42.476	85.971	12.196	14,760
15.	Sako	4	46.644	46.682	93.326	23.594	18,040
16.	Sematang	4	18.364	18.081	36.445	10.448	36,980
17.	Sukarami	7	79.537	78.709	158.246	42.794	51,459
18.	Alang-Alang Lebar	4	49.375	49.162	98.537	32.971	34,581
	<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>834.175</b>	<b>828.718</b>	<b>1.662.89</b>	<b>433.698</b>	<b>400,610</b>

Sumber: BPS Palembang Dalam Angka, 2020

Penduduk menjadi salah satu potensi sekaligus target pembangunan yang menjadi target oleh Pemerintah Kota guna peningkatan taraf hidupnya. Penduduk Kota Palembang pada kelompok produktif menjadi pekerja yang berada pada setiap sektor lapangan kerja yang tersedia. Penduduk yang

termasuk pada angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 759.115 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 472.577 dan perempuan sebanyak 286.538. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 60.242 orang. Jumlah penduduk yang menanggur hanya mencapai 7,94 % dari total jumlah penduduk kota Palembang. Artinya pengangguran tersebut dapat dibidang masih rendah, hal ini menjadi keuntungan bagi Kota Palembang guna menyediakan berbagai program yang menjadikan jumlah pengangguran tersebut sebagai target pembangunan dengan intervensi tertentu yang tepat.

Selain penduduk yang diserap sebagai tenaga kerja kualitas hidup penduduk kota juga dapat dilihat dari tingkat Pendidikan yang diraih. Angka partisipasi murni siswa di sekolah Kota Palembang secara keseluruhan hingga September 2019 jumlah anak putus sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Kota Palembang adalah sebanyak 1.278 anak. Dengan rincian untuk Sekolah Dasar sudah mencapai 99,6%, dan jenjang SMP baru mencapai 69,9%, atau sekitar 31,1% anak di Palembang usia Sekolah Menengah Pertama mengalami putus sekolah. Sementara untuk SMA dan SMK sudah mencapai 70,8% atau 29,2% anak usia SMA mengalami putus sekolah di Palembang. Hal tersebut, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Palembang dengan memberikan fokus pada pelayanan dasar dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi yang memiliki tugas mengelola urusan pemerintah Pendidikan tingkat atas. Hal ini dijadikan target dalam berbagai upaya guna peningkatan target peserta didik.

Selain Pendidikan juga kualitas hidup masyarakat kota Palembang yang juga menjadi target pembangunan manusia adalah tingkat kesehatan. Target yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat Kota Palembang secara umum diambil dari angka harapan hidup. Kota Palembang pada tahun 2019 yang memiliki rata-rata angka harapan hidup penduduk mencapai 70.54 tahun. Berbagai kelompok masyarakat dijadikan target pada program kinerja pembangunan bidang kesehatan, dimana pada tahun 2019 di Kota Palembang tersedia 33 buah unit rumah sakit pemerintah maupun swasta yang didukung dengan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas berjumlah 41 unit tersebar di penjuru Kota Palembang. hal ini menjadi dukungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimana pada di tahun 2018 IPM Palembang mencapai 77,89% dan tahun 2019 naik sebesar 0,55 poin menjadi 78,44%. angka tersebut menjelaskan IPM Kota Palembang berada di level tinggi.

Selain capaian IPM yang terukur pada tingkat tinggi sebagai Pada 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Palembang mencapai 180,67 ribu orang (10,90 persen). Bertambah sebesar 1,35 ribu orang dibandingkan dengan 2018 yang sebesar 179,32 ribu orang (10,95 persen). Kondisi ini menjadi target pemerintah Kota Palembang guna mencari cara inovatif dalam menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi seperti yang dicanangkan angka kemiskinan satu digit.

Tingkat kemiskinan tersebut, perlu dicarikan solusi dengan mengupayakan berbagai agenda program pengetasan kemiskinan yang tepat sasaran dengan dilandasi kerangka akademis yang handal. Dimana Garis Kemiskinan (GK) 2019 tercatat sebesar 521.489 rupiah per kapita per bulan. Angka ini naik dibandingkan dengan GK 2018 yang sebesar 510.994 rupiah

per kapita per bulan. Program pengetasan kemiskinan tersebut diupayakan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat. pengetasan kemiskinan juga didapta dnegan meberikan berbagai subsidi terutama menyasar dengan Pendidikan dan pemenuhan asupan gizi masyarakat. Permasalahan kemiskinan kota nantinya dapat diselesaikan secara terpadu dan terukur dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kondisi Penduduk bersamaan dengan potensi wilayah Kota Palembang menjadi modal yang dimiliki guna menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Kota Palembang sumberdaya yang dimiliki dan posisi kota Palembang merupakan upaya guna pemanfaatan territorial capital. Kawasan di kota Palembang memiliki fungsi dengan berbagai ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Kapasitas wilayah dimanfaatkan guna pengolahan berbagai sumberdaya dan bahan baku yang dimiliki. Sektor industri menjadi potensial guna mengupayakan pembangunan kota Palembang dengan peningkatan kegiatan industri secara merata diseluruh kawasan, baik industri kecil, menengah, maupun Industri Besar. Kegiatan industri kecil dan menengah secara spasial sebaiknya dikembangkan secara merata di seluruh wilayah Kelurahan di Kota Palembang. Pemilihan lokasi yang berada pada lingkaran batas luar akan sangat baik sebagai stimulan bagi pengembangan pemukiman dan fasilitas- fasilitas penunjang seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya.

Potensi Kawasan tersebut menjadi sebuah struktur perekonomian Kota Palembang selaras dengan diperkuat oleh pembangunan infrastruktur. Arah pembangunan infrastruktur fisik mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan konektivitas serta aksesabilitas Kawasan yang sengaja diciptakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penduduk dalam satu wilayah bekerja dengan memanfaatkan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki baik di potensi masyarakat berupa skill serta sumberdaya lainnya yang tersedia pada kota Palembang. Penyediaan berbagai program tentunya memberikan makna bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang tepat sasaran serta memenuhi target yang tersedia. Untuk itu, Kelitbangan disini diharapkan sebagai upaya melihat konstruksi program pembangunan dan kinerja pemerintah Kota Palembang yang terukur.

Dukungan promosi dan Kapasitas usaha guna peningkatan produktivitas ekonomi melalui produksi oleh UKM menjadi potensi daerah yang terpetakan. diidentifikasi pada UKM dengan klasifikasi berkembang cepat dan cepat tubu/cepat maju di Kota Palembang. UKM dengan produks bahan kimia dan bahan bangunan seperti pupuk kimia, barang dari karet, semen dan barang galian non logam; menjadi potensial masuk pada klasifikasi UKM berkembang cepat. Pada UKM dengan klasifikasi cepat tumbuh dan cepat maju adalah dari sektor Sandang dan Kulit, seperti tekstil, kulit dan alas kaki. Penguatan berusaha tersebut juga dilakukan dengan melalui penataan lokasi serta sarana prasarana yang baik, sehingga promosi serta pemasaran hasil produksinya.

Kelitbangan Kota Palembang menggunakan berbagai informasi terkait dengan kependudukan dan kondisi wilayah guna kesesuaiannya pada rancangan berbagai agenda kegiatan. Kota Palembang memiliki potensi dan modal yang cukup dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pembangunan dengan target penduduk dan juga investasi yang tercipta. Kapasitas penduduk serta potensi wilayah yang dimiliki Kota

Palembang menjadi modal dalam memilih berbagai program guna memberdayakan dan menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.

### 2.3. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatnya. Menjadi salah satu kinerja yang tersusun dalam perenanaan menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. penyelenggaraan pemerintah Kota Palembang diapresiasi dengan diterimanya kembali Nilai ukuran kinerja B (baik) yang diraih kembali secara empat tahun berturut turut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019. Tingkat capaian tersebut didasarkan pada tingkat keberhasilan pemerintah Kota Palembang dalam menrealisasi semua kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci.

Penyelenggaraan pemerintah Kota Palembang dikelola oleh 31 dinas dan 18 kecamatan. Tingkat keberhasilan kinerja pemerintah Kota yang bernilai B selama 5 tahun menjadi kerja bersama dari pada perangkat daerah dengan mengupayakan penyelenggaraan program yang tepat sasaran dan target dengan kesesuaian waktunya. Perangkat daerah dibentuk guna menjalankan fungsi memenuhi berbagai misi dan juga sasaran strategis dalam pembangunan Kota Palembang. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya memberikan dukungan terhadap 3 pemenuhan fungsi pemerintah, yaitu sebagai penyelenggara pelayanan, mengatur penyelenggaraan pemerintah, dan memberdayakan kelompok komunitas masyarakat yang berusaha dan bergerak dibidang sosial lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan sebagai salah satu bentuk fungsi kehadiran pemerintah digarap melalui penyediaan pelayanan elektronik oleh pemerintah daerah. Selain itu, evaluasi kinerja pemerintah Kota Palembang dilakukan dengan melihat kapasitas pengelolaan teknologi informatika sebagai pendukung layanan berbasis elektronik. kota Palembang dalam pengelolaan teknologi informatika memperhatikan kebutuhan terhadap dimensi aplikasi layanan yang dibutuhkan. Aplikasi layanan berbasis elektronik direncanakan melalui pemetaan kebutuhan layanan dengan melihat target pelangganya. Fungsi urusan bidang komunikasi dan informatika (kominfo) dipastikan menyelenggarakan fungsi regulator serta menyiapkan aplikasi layanan guna mendukung layanan berbasis elektronik.

Dinas Kominfo menjadi perangkat fasilitator guna Penyiapan berbagai aplikasi layanan elektronik tersebut dibutuhkan guna menjamin ketersediaan. Dimaksudnya perangkat fasilitator, mereka memetakan berbagai aplikasi yang dibutuhkan guna pelayanan masyarakat. pelayanan berbasis elektronik Kota Palembang perlu menjaga konsistensi dalam penyelenggaraannya sehingga membutuhkan kerangka perencanaan dan kebijakan tentang pengelolaan sistem penyelenggaraan layanan elektronik. Penyelenggaraan pelayanan elektronik disusun dengan memperhatikan skala prioritas kebijakan implementasi teknologi informatika, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan digital dan informasi kesehatan dengan latar belakang TI, Penambahan program pengembangan SDM.

Pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh jenis pelayanan akan mengarah ke layanan elektronik sehingga memudahkan warga kota itu dalam pengurusan layanan. Terdapat sekitar 528 jenis layanan yang ada di Halo Palembang, aplikasi itu memuat semua jenis layanan yang dikeluarkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Penyediaan aplikasi tersebut menjadi sebuah upaya pemerintah Kota Palembang memenuhi berbagai layanan administrative dan perijinan bagi masyarakat kota Palembang. Pelayanan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk memimplementasikan kebijakan Smart City Kota Palembang.

Pemberian layanan menjadi tugas pemerintah Kota Palembang dengan menyelenggarakan efektif dan efisien dan infrastruktur IT sebagai perangkat pendukung. Penggunaan teknologi informatika pada era saat ini menjadi pemicu pemerintah daerah menghantarkan pelayanan kepada masyarakat sedekat mungkin dan semurah mungkin. Melalui IT membutuhkan upaya kolaboratif guna integrasi data, aplikasi, dan layanan pada perangkat lunak yang mudah diakses sehingga memiliki intropropabilitas yang handal. Pengelolaan data dan informasi untuk layanan dengan upaya introprobalitias menjadi langkah penting menjadi landasan smart government yang menjadi dimensi smart city yang diciptakan oleh Kota Palembang.

Selain itu, smart city menjadi upaya menciptakan keselarasan kehidupan dan rasa nyaman dalam masyarakat perkotaan yang mengadposinya. Kenyamanan penduduk kota Palembang didapat dari kapasitas pembangunan Kota dengan mengedepankan pemanfaatan tata kelola lingkungan dan Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang sehat dan bersih (good and healthy environment) serta akses yang mudah dalam memperoleh kebutuhan hidupnya (economic viability).

Kondisi tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan sangat bertolak belakang kota Palembang pada kondisi senyatanya menghadapi permasalahan yang rutin tiap tahunnya terjadi. Tantangan penyelenggaraan smart city dengan dimensi smart environment menjadikan permasalahan asap yang dihasilkan dari pembukaan lahan perkebunan yang hadir setiap tahunnya, pemanfaatan ruang terbuka hijau sampai ketersediaan air bersih yang dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat terkendala pada periode dan waktu tertentu.

Smart city merupakan konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan berbagai keunggulan teknologi yang membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Smart city menekankan pada tiga permasalahan utama perkotaan meliputi, fisik, sosial dan ekonomi yang kesemua tersebut didukung dengan teknologi informatika. Layanan elektronik wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat terhadap penyiapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mal Pelayanan Publik didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju pemerintahan yang baik dan berbasis penggunaan teknologi terpadu. Untuk itu, dituntut juga penguatan pada institusionalisasi pembanguna penyelenggaraan pelayanan elektronink antar/sesame perangkat daerah beserta masyarakat. begitu juga dengan pelayanan dasar yang disiapkan.

Kebijakan percepatan SPM Bidang kesehatan menitikberatkan 12 layanan dasar dengan 4 target utama. Strategi dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kota

Palembang. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut yang diatur dalam peraturan walikota dapat mempercepat pemenuhan layanan terhadap target layanan yang dasar. Pemerintah Kota Palembang selain menjadi aktor pelayanan juga sebagai regulator guna mengatur berbagai tindakan/kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. berbagai pengaturan disiapkan guna pemerintahan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Regulasi yang dibuat kiranya menguatkan kinerja perangkat daerah. Berbagai rancangan peraturan daerah menjadi target sekaligus upaya mempertegas tugasnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan regulasi berupa peraturan daerah dan juga peraturan lainnya memerlukan kolaborasi dari berbagai pemahaman dan perlakuan yang sudah berjalan pada pemerintahan daerah hingga saat ini. Tuntutan tentang kinerja pemerintah dalam tata kelola dan layanan publik mengarahkan rencana induk Kelitbangan berfokus penguatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik memberikan gambaran pemerintahan Kota Palembang dalam berbagai pencapaian kinerjanya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota untuk memenuhi berbagai tingkatan capaian pada setiap sasaran program pemerintahan. Usaha pencapaian target tersebut juga didukung dengan penyiapan kebijakan berbasis smart city dengan penekanan pada penggunaan teknologi informatika guna pemecahan permasalahan fisik, sosial dan ekonomi perkotaan.

#### 2.4. Sosial dan Kemasayarakatan

Kota Palembang sebagai salah satu kota yang maju di pulau sumatera akan terus berubah guna penyesuaian terhadap kondisi global dan regional. Tentu hal tersebut akan memiliki dampak langsung pada kondisi sosial dan masyarakat yang harus beradaptasi serta responsi guna tetap berkesinambungan terhadap perubahan yang terjadi. Berbagai event internasional sudah sering diadakan dan terjadi pembanguann insfrastrukturu yang cukup masih dalam periode 5 sampai 10 tahun kebelakang.

Perubahan tersebut direspon dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program sosial perkotaan menjadi landasan dan faktor dalam perkembangan sosial di dalam masyarakat. Beberapa ukuran kinerja pemerintah daerah ditinjau dari aspek sosial yang dapat menjadi rujukan yaitu ketimpangan dan indeks pembangunan manusia. Pemerintahan Kota Palembang mengalokasi besaran anggaran APBD untuk bidang layanan dasar yaitu alokasi bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran mencapai 33 %.

Sementara itu, untuk Kesehatan, Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran sebesar 15%. Layanan yang disiapkan dapat dimanfaatkan dalam keselarasan memperbaiki strata sosial masyarakat yang dijelaskan melalui angka kemiskinan. Disayangkan masih adanya warga miskin yang belum terakses pelayanan kesehatan gratis dan juga dukungan asupan gizi yang memadai, khususnya bagi anak-anak warga miskin.

Tebel. 1.2.  
Jumlah penduduk miskin di Kota Palembang  
menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Miskin
1.	Illir Barat II	6.459
2.	Gandus	8.317
3.	Seberang Ulu I	9.501
4.	Kerapati	12.138
5.	Jakabaring	6.394
6.	Sebrang Ulu II	9.312
7.	Plaju	9.801
8.	Ilir Barat I	6.014
9.	Bukit Kecil	3.111
10.	Ilir Timur I	4.045
11.	Kemuning	5.284
12.	Ilir Timur II	4.899
13.	Kalidoni	6.550
14.	Ilir Timur III	4.288
15.	Sako	4.594
16.	Sematang Borang	2.904
17.	Sukarami	7.604
18.	Alang-Alang Lebar	3.227
Total		114.492

*Sumber: BDT/DTKS Dinas Sosial, 2020*

Berbagai layanan dasar untuk masyarakat miskin disiapkan guna mengejar target capaian turutnya angka kemiskinan hingga satu digit Target pembangunan tersebut diarahkan pada kebutuhan sosial masyarakat. Berbagai upaya tersebut dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi kinerja pemerintah. Secara umum persentase penduduk miskin dari tahun 2010 (15 persen) sampai tahun 2017 mengalami penurunan (11,40 persen) kemudian turun lagi pada tahun 2019 menjadi 10,90 persen mencapai 180,67 ribu orang dari 1.662.893 jiwa. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Palembang mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Tebel. 1.3.  
Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang 2017-2019

Tahun	P0	P1	P2	GK (Rp/Kapita/Bulan)
2017	11,40	1,76	0,4	480.735
2018	10,95	1,70	0,3	510.994
2019	10,90	1,86	0,5	521.489

*Sumber: BPS Palembang Dalam Angka, 2020*

Pemerintahan Kota Palembang memkonsolidasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menupayakan pemetaan penduduk miskin. Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang memuat informasi warga miskin berdasarkan nama, alamat dan foto, sehingga akurat serta tidak merepotkan OPD dalam mencari calon penerima bantuan atau permodalan. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDP) terbaru menunjukkan masyarakat miskin di Kota Palembang berjumlah 108.000 dengan kantong-kantong kemiskinan berada di Wilayah Kertapati, Plaju, Seberang Ulu dan Jakabaring.

Sistem informasi tersebut membantu memudahkan pemerintah Kota Palembang dalam memantau serta mengambil keputusan penanggulangan kemiskinan melalui pertimbangan faktor tertentu. Pengetasan kemiskinan menjadi Terdapat ada dua faktor utama masyarakat masuk pada penyebab kemiskinan dan ketidak berdayaan (powerless), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kendala dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti rendahnya motivasi, etos kerja, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Faktor eksternal meliputi belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki masyarakat tidak dapat ditumbuh kembangkan.

Indeks gini rasio dengan tujuan mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks gini rasio tersebut tergambar hampir selama 10 tahun kebelakang sampai tahun 2017. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Palembang tahun 2019 sebesar 1,86 meningkat sebesar 0,16 dari tahun 2018 yang sebesar 1,7. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Palembang tahun 2019 sebesar 0,50 meningkat sebesar 0,11 dari tahun 2018 yang sebesar 0,39. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kalangan.

Kedalaman kemiskinan Penduduk kota Palembang didapat dari penghasilan yang diterima sebagai pekerja. Kota Palembang memiliki jumlah penduduk berada pada usia Angkatan kerja diatas 15 tahun. Table dibawah ini menjelaskan jumlah Angkatan kerja penduduk Kota Palembang pada tahun 2019.

Tabel 1.4.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angakat Kerja (Jiwa)

Kegiatan Utama	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	472.577	286.538	759.115
- Bekerja	432.870	266.003	698.873
- Pengangguran Terbuka	39.707	20.535	60.242
II. Bukan Angkatan Kerja	144.292	337.819	482.111
- Sekolah	66.137	67.819	133.956
- Mengurus Rumah	32.257	252.711	284.968
- Lainnya	45.898	17.289	63.187
Jumlah	616.869	624.357	1.241.226

Sumber: BPS Kota Palembang, 2020

Penduduk kota Palembang yang masuk pada usia 15 tahun keatas mencapai 1.241.226 dari total jumlah penduduk 1.662.893 jiwa. Angkatan kerja penduduk kota Palembang berjumlah 759.115. jiwa dengan jumlah penduduk penangguran terbuka sebesar 7,9 % dari total penduduk Angkatan

kerja. Angka tersebut menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang produktif dengan menghasilkan pendapatan pada tiap sektor pembangunan di Kota Palembang.

Mendapatkan pekerjaan menjadi kebutuhan dan kesempatan sosial penduduk guna memanfaatkan berbagai kapasitas yang dimiliki oleh setiap penduduk. Pengangguran menjadi Kondisi atau suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, kapasitas masyarakat dalam berwirausaha guna menghasilkan berbagai produk. Pengembangan masyarakat mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang diharapkan dengan program yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan sosial dan kemasayarakatan.

Friedman (1992) menyatakan ada dua tahap pemberdayaan. Pertama, pemberdayaan individu merupakan pemberdayaan setiap anggota masyarakat/keluarga. Nantinya apabila setiap individu dibangkitkan pemberdayaannya maka setiap individu akan mampu membuat jaringan pemberdayaan yang lebih luas. Kedua pemberdayaan kelompok antar individu.

Pemberdayaan antar individu akan membentuk ikatan kelompok. Ikatan kelompok ini akan membentuk jaringan menjadi kelompok masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Fokus pembangunan juga mengarah pada Penyandang masalah kesejahteraan sosial didekatkan dengan intervensi individu dan intervensi sosial lainnya.

Pemberdayaan memastikan targetnya terdiri dari individu, komunitas, dan Lembaga yang mengupayakan berbagai peningkatan kesejahterannya. Berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Palembang mengarahkan sasaran pemberdayaan pada kerajinan tradisional, usaha kecil, memanfaatkan lahan pekarangan untuk budi daya ikan dan kebun sayuran. Sektor usaha tradisional dan pengolahan tradisional yang dekat dengan masyarakat digerakan guna memenuhi capaian agenda rencana pembangunan yang menargetkan menurunkan angka kemiskinan pada angka satu digit. Melalui program pemberdayaan tersebut diharapkan menurunkan angka penduduk miskin lebih besar lagi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Target sasaran pemberdayaan yaitu fakir miskin, komunitas adat, komunitas perkotaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Selain permasalahan pemberdayaan masyarakat, kota Palembang juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan Kawasan lingkungan. Kumuh diawali dengan perilaku serta tingkah laku kelompok masyarakat yang tercipta di dalam lingkungan. Kumuh menjadi target yang tepat disana juga terdapat masyarakat miskin yang juga menjadi intervensi dalam kebijakan pemberdayaan atau sosial pemerintah Kota.

Intervensi tersebut berada pada luas wilayah kumuh sebesar 2032,11 Ha menjadi tantangan pengelolaan kawasan. Tentunya permasalahan lingkungan kumuh menjadi tantangan yang segera mungkin dicarikan penyelesaian permasalahannya dengan menyadarkan masyarakat serta penguatan kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam menjamin penataan ruang. Penggunaan ruang dan Kawasan oleh masyarakat tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang

yang sudah ditetapkan dalam Perda. Untuk itu, pengelolaan berbagai Kawasan yang sudah terbentuk secara tegas memerhatikan ketentuan yang sudah diatur dan selanjutnya dapat dimanfaatkan.

Wilayah kumuh memiliki permasalahan dengan pengelolaan lingkungan terutama kebersihan serta penataan struktur ruangnya. Kebersihan terutama pengelolaan sampah menyumbang berbagai permasalahan dengan perilaku hidup sehat yang masih belum tercipta. Masih rendahnya partisipasi warga untuk berperan aktif dalam kegiatan bank sampah maupun pemanfaatan bank sampah yang ada. Untuk itu, partisipasi aktif dari masyarakat bersama pemerintah Kota menjadi hal yang utama guna memecahkan permasalahan Kawasan kumuh dan untuk selanjutnya mendorong upaya peningkatan program intervensi guna penyadaran masyarakat dalam menjaga serta melestarikan kebersihan lingkungan.

Masyarakat memiliki andil besar dalam menjaga dan memelihara pemukiman dan Kawasan yang ditinggalkannya. Potensi smart city yang terelaborasi dengan kebijakan pembangunan menjadi sebuah keuntungan yang strategis guna penanganan berbagai permasalahan sosial dan infrastruktur yang terdapat pada Kawasan kumuh kota Palembang. kolaborasi bersama antara pemerintahan dan masyarakat untuk dapat menuntaskan permasalahan Kawasan kumuh melalui kegiatan penyadaran bersama dan konstruksi kebijakan yang handal dalam penuntasannya.

Selain Kawasan kumuh, kota Palembang juga sudah menyiapkan infrastruktur pengolahan sampah pada setiap kecamatannya. Bahwa dari 16 kecamatan, hanya 10 kecamatan yang memiliki bank sampah. Selain ketersediaan tersebut terdapat permasalahan terkait pengelolaan sampah secara mandiri oleh warga yang masih belum berjalan efektif. Membutuhkan ketersediaan sarana pengolahan sampah itu pasti dan harus dapat dipenuhi sesegera mungkin serta tidak kalah pentingnya, memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga karena masyarakat masih enggan memilah sampah plastik yang masih bisa dijual dan sampah rumah tangga. Instalasi Pengolahan Sampah 3 R (Reuse, Reduce, Recycling) ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Para penggerak Instalasi Pengolahan Sampah ini juga menjadi salah satu wadah Bank Sampah.

Kota Palembang memiliki regulasi yang mengatur pengolahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah sejenisnya. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 memberikan berberapa petunjuk serta mekanisme pengolahan sampah. Dilihat dari umurnya perda ini memang masih baru ditetapkan. Untuk itu, perlu dikawal impelementasinya serta pemanfaatan berbagai sumberdaya yang dikelola dalam mencapai berbagai tujuan dari regulasi.

Berbagai upaya pemerintah Kota Palembang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial dan kemasyarakatan. Rencana Induk kelitbangan memetakannya untuk menjadi landasan dalam mempertimbangan berbagai kegiatan kelitbangan yang akan dilakukan nantinya. Pada komponen yang menjadi fokus merupakan pengetasan kemiskinan perkotaan melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat serta konstruksi intervensi sosial dalam memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, permasalahan Kawasan kumuh perkotaan menjadi tantangan dalam berbagai upaya perbaikan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga serta pelaku usaha.

## 2.5. Kondisi Ekonomi dan Pembangunan

Pembangunan daerah menekankan pada pemilihan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Pemilihan dan penentuan kebijakan merupakan inisiatif daerah dalam mengelola sumberdaya yang tersedia guna keberlangsungan proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Giat perekonomian Kota Palembang juga mengalami fluktuasi dalam perjalannya dengan ukuran laju pertumbuhan ekonomi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah yaitu, pertama adalah arah proses transformasi perekonomian, dan yang kedua adalah proses globalisasi. Kota Palembang mencatat laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2019 sebesar 5,94 persen. Laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses transformasi perekonomian yang memberikan gambaran pergerakan ekonomi dengansangat dipengaruhi dengan produktivitas berbagai sektor perekonomian yang tercipta di Kota Palembang.

Target peningkatan ekonomi wilayah menjadi sebuah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut didukung dengan Kondisi penduduk dalam berusaha, Pembangunan ekonomi lekat dengan peningkatan nilai dan harga melalui pendapatan perkapita penduduk. Pergerakan ekonomi tersebut diupayakan dengan berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan guna mengatasi Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Palembang yang berdampak pada stabilitas perekonomian, hingga ke masalah sosial dan keamanan.

Kondisi ini menunjukkan bergeraknya pembangunan dan perekonomian di Kota Palembang kearah yang positif dengan sektor utama penggerak adalah Pada tahun 2019, tiga sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 31.28 persen, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 17.90 persen serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17.50 persen. Selanjutnya, melihat Produk Domestik Regional Bruto tersaji pada table dibawah ini secara lengkap.

Tabel. 1.5.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang 2017-2019

No	Sektor Produk Domestik Regional Bruto	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
		2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.51	0.49	0.47
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0.00
C.	Industri Pengolahan	33.10	32.11	31.28
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.18	0.17
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.29	0.3	0.31
F.	Konstruksi	18.35	18.39	17.90

No	Sektor Produk Domestik Regional Bruto	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
		2017	2018	2019
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.74	16.73	17.50
H.	Transportasi dan Pergudangan	4.71	4.91	5.21
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.89	3.12	3.47
J	Informasi dan Komunikasi	6.87	6.98	7.11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.05	4.89	4.52
L.	Real Estate	4.65	4.7	4.93
M, N.	Jasa Perusahaan	0.18	0.19	0.2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.52	2.25	2.1
P	Jasa Pendidikan	3.28	3.11	3.11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.68	0.64	0.65
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1.01	1.02	1.06
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber: BPS Palembang Dalam Angka, 2020

Pada tiga sektor industri penggerak tersebut pada industri pengolahan dan konstruksi terlihat ada penurunan di tiap tahunnya, pergerakan turun tersebut hampir 0,5 % - 1 %. Trend berbeda ditunjukkan pada sektor lainnya, mengalami peningkatan 0,5 % - 1 %. Sektor PDRB tersebut merupakan sektor lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Palembang guna menjalankan roda perekonomian. Ketiga sektor yang bergerak positif memberikan gairah tersendiri pada sektor UMK dan industri kecil yang terbentuk di Kota Palembang yang dapat mempekerjakan karyawan pada setiap wilayah kecamatan.

Pemerintah Kota Palembang memiliki peluang dalam mengelola usaha masyarakat dan industri pengolahan. Dengan hadirnya berbagai jenis usaha masyarakat diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam perekonomian. Selanjutnya, adapun jumlah unit usaha di Kota Palembang yang terbentuk dan tenaga kerja yang terserap sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6.  
Jumlah Perusahaan Skala Industri Kecil dan Tenaga Kerja  
di Kota Palembang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1.	Jumlah UMKM	Unit	36.601	37.101	37.902
	- Pengusaha Mikro dan Kecil	Unit	31.071	31.561	32.285
	- Pengusaha Menengah	Unit	5.530	5.540	5.617
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	149.586	150.616	153.173
	- Pengusaha Mikro dan Kecil	Orang	124.093	125.073	127.245
	- Pengusaha Menengah	Orang	25.493	25.543	25.928

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2020*

Kelompok UKM yang memiliki kontribusi terbesar berada pada kelompok UKM dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor konstruksi: sektor angkutan dan komunikasi; dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Usaha masyarakat menjadi fokus pembangunan dan capaian kinerja pemerintah kota Palembang yang tersaji dalam Misi ke empat mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Misi tersebut memiliki ukuran dan sasaran yang mendorong kreatifitas serta inovasi dalam berusaha di dalam masyarakat. Sasaran dari misi ke empat tersebut berupaya memberikan pertumbuhan melalui perkembangannya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).

Perumusan sasaran tersebut guna menjawab tantangan kondisi usaha masyarakat yang tercipta di Kota Palembang. beberapa capaian sasaran strategis yang masih dibawah target kinerja. UMKM, dimana rasio UMK yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah masih sangat rendah, yaitu hanya 15% dari target sebesar 26%, atau hanya 62,5%. Masih rendahnya capaian terget tersebut mendorong untuk memfokuskan kinerja perekonomian yang berbasis masyarakat pada strategi-stratergi yang disusun, yaitu:

- Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry).
- Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga.
- Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.

Strategi tersebut mengupayakan peningkatan produktivitas dari UMKM yang sudah tumbuh dan berkembang hingga saat ini. UKM berdasar pertumbuhan dan kontribusinya diperoleh: 1) UKM yang memiliki klasifikasi berkembang cepat adalah UKM dari sektor kimia dan bahan bangunan seperti pupuk kimia, barang dari karet, semen dan barang galian non logam; 2) UKM yang cepat tumbuh dan cepat maju adalah dari sektor Sandang dan Kulit, seperti tekstil, kulit dan alas kaki; 3) UKM yang yang cepat maju tetati tertekan

dari sektor logam dan jasa, seperti alat angkutan, mesin dan peralatan; dan kerajinan umum, seperti barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; dan 4) UKM yang relatif tertinggal justru dari sektor pangan, seperti makan dan minuman.

Menjamin keberlangsungan UKM tersebut pengembangan UKM di Kota Palembang yang tepat yaitu dengan pemberian fasilitas pembinaan, pengembangan SDM, bantuan peralatan dan pemasaran melalui promosi serta pameran ditingkat provinsi/nasional. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk mendorong UMKM agar terus dapat berkembang melalui program bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- yang diharapkan dapat membantu dari kesulitan mencari modal usaha.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk mendorong UMKM agar terus dapat berkembang melalui program bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan. Kota Palembang dapat lebih bersinergi dan menghasilkan produk-produk kreatif dengan nilai tambah yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palembang. Pertumbuhan UKM yang begitu baik di kota Palembang beradaptasi terhadap perubahan pola bisnis dan perdagangan. Penguatan kapasitas kewirausahaan juga terkena imbasnya bersama hadirnya era digital saat ini. Teknoprenurship menjadi pendekatan baru yang melibatkan perangkat teknologi informasi dengan para pengusaha. Pergeseran juga terjadi dengan hadirnya berbagi komunitas usaha rintisan (starup) yang mengembangkan perangkat sistem informatika pada kehidupan masyarakat. kehadiran komunitas usaha rintisan tersebut menjadi dukungan guna pembentukan digital ekonomi di kota Palembang.

Kemudian diharapkan kedepannya para pelaku UMKM segera untuk dapat beradaptasi dengan mensinergikan kedalam konstursi ekonomi kreatif sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Garnham (2005) pembangunan suatu wilayah dapat didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi yang dapat diberdayakan dengan dukungan pemerintah lokal serta kemampuan skill yang dimiliki anggota keluarga dapat meningkatkan daya saing dan jual kepada pelanggan.

Selanjutnya mempertimbangkan visi emas 2030 kota Palembang menjadikan sektor pariwisata menjadi penggerak roda perekonomian. Pariwisata menjadi sektor sasaran dalam pengembangan perekonomian dan pembangaunan kota Palembang. sektor pariwisata tentunya mengajak serta dimensi ekonomi kreatif di dalamnya, sehingga konstruksi sektor wisata menjadi sektor penggerak roda perekonomian menjadi lebih bisa diandalkan.

Keempat subsektor ekonomi kreatif (ekraf) tersebut adalah kuliner, kriya, aplikasi dan film. Aneka produk kuliner dan kerajinan tangan khas kota Palembang yang merupakan usaha masyarakat kecil diharapkan dapat tembus pasar internasional. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan belum adanya dukungan dan tingkat pengetahuan yang masih minim dari instansi terkait mengenai industri kreatif. Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa di kawasan urban Palembang industri kreatif yang paling banyak dilakukan adalah layanan komputer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan, video, film dan fotografi, kerajinan dan periklanan. Ekonomi kreatif di Kota Palembang banyak dilakukan kawasan urban Palembang adalah kerajinan. Kerajinan yang banyak dilakukan di kawasan ini adalah kerajinan tenun

songket dan souvenir songket. Sebagai salah satu daerah yang terkenal akan kain tenun songket, menjadikan jenis kerajinan ini banyak dilakukan.

Selain itu guna mendorong tumbuhnya jenis ekonomi kreatif lainnya pemerintah Kota berupaya dengan menyediakan dukungan teknologi. Dengan melakukan pemetaan dengan teknologi yang lebih baik serta adanya dukungan dari instansi terkait diharapkan industri kreatif di tiap kawasan urban akan semakin berkembang sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif juga tidak lepas dari pengembangan kreatifitas masyarakat dengan pemberian ruang publik.

Pemerintah Kota Palembang terus berupaya menambah dan pengembangankan ruang publik baru seperti pemanfaatan di Pedestrian Sudirman dan Kenten Street untuk para komunitas agar dapat berinteraksi, berkerasi dan berinovasi dengan kreatifitas yang dimiliki masyarakat. pengembangan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diharapkan dapat menstimulasi ide kreatif melalui interaksi antar penduduk.

Pemanfaatan ruang menjadi pendukung guna keberlangsungan pelastarian dan pengenalan budaya Kota Palembang. berbagai atraksi budaya dan juga penataan ruang khusus pelestarian budaya menjadi bentuk jaminan guna penguat sektor pariwisata kedepannya. Selain itu, dibutuhkan destinasi wisata buatan berbasis budaya guna menjadi bagian dari ketersediaan infratraktur ekonomi budaya pada pembangunan di Kota Palembang.

Komponen ekonomi dan pembangunan menitikberatkan dalam mengupayakan capaian target peningkatan interaksi masyarakat dengan aktivitas ekonomi. Sektor sekunder dan tersier merupakan sektor menjadi sektor utama dalam pertumbuhan perekonomian melalui dukungan oleh subsektornya, sehingga penguatan kebijakan yang dibuat hendaknya dapat mendukung perkembangan sektor dan sektor-subsektor dimaksud. Selain itu, guna mersepon kepemilihan sumberdaya lokal baik pengetahuan masyarakat dan ketersediaan bahan baku, ekonomi/industri kreatif menjadi strategi yang dipertimbangan untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi Kota Palembang.

## 2.6. Inovasi dan Pengembangan Iptek

Berbagai akselerasi guna percepatan kinerja pembangunan melalui inovasi daerah yang diterapkan. Penyelenggaraan inovasi bergerak pada tataran tata kelola pemerintahan melalui pemberian layanan pada setiap urusan pemerintahan yang dimiliki. Salah satu faktor pendorong munculnya aksi inovasi pada pemerintah dengan adanya tuntutan perubahan guna peningkatan kualitas pelayanan dari lingkungan eksternal maupun pemangku kepetingan dan juga didorong oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui agenda Pemerintah pusat memberikan stimulasi guna menghadirkan inovasi dalam pemeritahan m elalui pemberian penghargaan dan juga perlombaan inovasi sesuai bidangnya masing- masing. Berberapa penghargaan inovasi menjadi target pemerintah Kota Palembang. Dengan demikian, berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang membuat harapan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, dampak lainnya dari inovasi daerah yang dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna mendukung kinerja inovatif pemerintah

daerah. Ketersediaan sumberdaya tersebut menjadi upaya pemerintah untuk bergerak lebih fleksibel dan mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan.

Inovasi pelayanan dalam urusan Pendidikan kota Palembang berkolaborasi dengan Lembaga pemasarakatan anak kelas I melalui program SELFI. Inovasi yang dilakukan dengan memecahkan permasalahan keterbatasan Pendidikan yang didapat oleh anak yang bermasalah dengan hukum. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk terobosan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang, dalam membantu anak-anak didik di LPKA Klas I Pakjo dalam mendapatkan hak mendapatkan pendidikan.

Terdapat Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dikirim mewakili Pemerintah Kota Palembang ke Tingkat Nasional. Memiliki tiga target inovasi yang diusulkan untuk mengikuti penyelenggaraan lomba ditingkat nasional, menunjukkan pemerintah Kota Palembang memiliki jejak untuk menciptakan ekosistem inovasi pada setiap unit perangkat daerah. Upaya-upaya inovasi terus diasah guna menjaga keberlangsungan inovasi yang sudah tercipta. Berbagai stimulasi datang dari pemerintah Pusat guna menjamin keberlangsungan inovasi melalui pemberian penghargaan.

Inovasi daerah kebijakan yang dikonstruksi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Inovasi dilakukan melalui dua tahap. Pertama, mulai membuat produk inovatif dengan mengacu pada aspek-aspek yang ada pada bagian creation. Kedua, setelah produk inovatif itu sudah berhasil dikreasikan dan dipastikan mengikuti unsur-unsur yang ada pada indicator- indikator creation, harus memastikan bahwa produk inovatif itu didistribusikan dengan baik kepada masyarakat atau pengguna dengan memastikan bahwa indikator deployment sudah diikuti. Penciptaan inovasi disertai kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan guna memberikan pengetahuan yang sama dalam proses pelaksananya.

Pemerintah daerah menjadi aktor inovasi dengan menupayakan perubahan yang terukur melalui perbaikan kinerja dan proses yang lebih handal. Inovasi yang handal menghasilkan kebijakan pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat. berbagai tantangan pembangunan kota Palembang diharapkan dapat diciptakan berbagai inovasi melalui pertimbangan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan yang dibawa oleh inovasi mengubah cara hidup masyarakat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan.

Perintah regulasi yang ada pada saat ini, pemerintah menjadi memakarsa dan sekaligus penumbuh budaya inovasi dengan strategi replikasi, adopsi, dan modifikasi dari berbagai inovasi atau teknologi yang sudah tersedia. Inovasi menjadi wahana baru pada saat ini, inovasi didahului dengan kreatifitas aparatu dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Inovasi menjadi praktek hulu dari berbagai aktivitas kelitbangan guna penguatan berbagai agenda strategis pembangunan daerah. inovasi yang diciptakan pemerintah tentunya memiliki beragam bentuk yaitu inovasi pelayanan, inovasi administratif, inovasi pengembangan pandangan baru, inovasi kebijakan, serta inovasi sistemik yakni bagaimana memaksimalkan potensi jalinan kerja sama dengan organisasi luar.

Pengembangan lingkungan inovasi guna menjadi budaya kerja di Pemerintah Kota Palembang merupakan asa yang terus dikreasikan. Inovasi menciptakan keunggulan organisasi pemerintah, melalui proses inovasi

terhadap produk jasa serta layanan diberikan kepada masyarakat sebagai pelanggannya. Menciptakan produk dan layanan public yang unggul dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sementara Cooper (2001) mengemukakan pendorong sebuah proses inovasi dalam empat hal utama yaitu (a) Kemajuan teknologi (Technology advances), (b) Perubahan kebutuhan pelanggan (Changing customer needs), (c) siklus hidup produk yang semakin cepat (Shortening product life cycles) dan (d) meningkatnya kompetensi global (Increased world competition).

Inovasi sosial juga sudah dilakukan dengan memecahkan permasalahan pendidikan dan kemiskinan yang semua terletak pada Kawasan tertentu di Kota Palembang. Permasalahan perkotaan dengan metode dan pendekatan baru menjadi bagian bentuk inovasi sosial yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, juga berbagai kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mengupayakan kehadiran ekonomi kreatif perlu dicarikan berbagai upaya sehingga hal tersebut dapat terrelalisasi dengan baik.

Penggunaan teknologi informatika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Palembang. Penggunaan tersebut termasuk bentuk inovasi teknologi yang diupayakan guna memberikan berbagai pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kota agar lebih sejahtera dan berkeadilan. Aktivitas inovasi dan penguatan teknologi menjadi komponen rencana induk kelitbangan diharapkan meningkatkan berbagai penggunaan pengetahuan (Knowledge Management) guna memberikan kebijakan dan keputusan handal. Komponen ini mengarahkan pada penciptaan ekosistem inovasi daerah dengan menekan pada peningkatan indeks inovasi daerah dimasa datang. Selain itu, berbagai replikasi dan difusi dengan memanfaatkan invensi yang tersedia diharapkan menjadi sebuah kerangka kerja inovasi sosial dan inovasi kebijakan (pemerintah).

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana induk Kelitbangan Kota Palembang memperhatikan praktik penyelenggaraan pembangunan daerah dengan priodesasi jangka Panjang. Pemilihan jangka Panjang dengan memperimbangkan sebagai landasan pembangunan pada priodesasi jangka menengah. Untuk itu, Rencanan induk kelitbangan menjadi agenda rutin yang dirancang guna menentukan berbagai pelaksanaan kelitbangan guna menentukan kebijakan pelayanan yang inovatif berbasis pengetahuan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang pembangunan menfokuskan pada aspek pemerintah, pelayanan kepada masyarakat, investasi, dan pembangunan Kawasan perkotaan. Aspek tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan landasan dasar berbagai praktik kelitbangan Kota Palembang. Berikut penyandingan misi pada tiap jangka pembangunan Kota Palembang sebagaimana tertera dalam table dibawah ini.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Strategi RPJPD Tahun 2005-2024 Kota Palembang

Misi RPJPD	Misi RPJMD 2018-2024
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik ( <i>local good governance</i> ) dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten.	1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi
2. Meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik.	2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang menjamin aksesibilitas publik dan berwawasan lingkungan.	3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha.	4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi
	5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Sumber: RPJPD 2005-2025

Deskripsi Misi RPJPD Periode ke Empat dengan misi RPJMD 2018-2024 Kota Palembang terdapat keselarasan fokus yang ingin dicapai. Dimensi ekonomi, pemerintahan yang berbasis TI, sektor penggerak ekonomi yang mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan inovatif serta upaya melestarikan budaya menjadi isu yang harus dijawab dalam pembangunan pada periode saat ini. Hal tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan guna perumusan berbagai arah dan strategi kelitbangan Kota Palembang pada Rencana Induk Kelitbangan.

### 3.1.2. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kota Palembang 2005 - 2024. Adapun Visi Pembangunan Kota Palembang dalam pembangunan jangka panjang adalah:

”Palembang Kota Jasa yang Berkualitas, Mandiri dan Berbudaya”

Misi 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik (*local good governance*) dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan:

- 1) Arah umum pembangunan bidang politik diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan *citizenship* (hak, kewajiban, dan etika warga kota); peningkatan kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik; peningkatan efektivitas lembaga pemerintah kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan; pengembangan budaya politik yang sehat; penyediaan media komunikasi politik; peningkatan hubungan antardaerah dan/atau luar negeri.
- 2) Arah pembangunan penegakan hukum diwujudkan melalui pembaruan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik penegak hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.
- 3) Arah pembangunan keamanan dan ketertiban Kota Palembang diwujudkan melalui restrukturisasi kebijakan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban; peningkatan kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat; peningkatan peran serta dan tanggung jawab warga kota; serta pengembangan standar pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Misi-2 adalah meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan:

- 1) Arah pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar; peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang.
- 2) Arah pembangunan pemerintahan daerah diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Palembang; penataan kelembagaan pemerintahan daerah; pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola kota; peningkatan kualitas kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri; peningkatan kapasitas pemerintah Kota Palembang.

Misi-3 adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang menjamin aksesibilitas publik dan berwawasan lingkungan. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan:

- 1) Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota; pengembangan sumber daya sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman; pengembangan pengelolaan energi; pengembangan telematika perkotaan; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kota; pembangunan

ekonomi wilayah diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah secara konsisten; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah.

- 2) Arah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor yang lain; pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; peningkatan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat peduli pada lingkungan; penegakan hukum di bidang lingkungan secara konsisten.

Misi-4 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha. Ini dijabarkan dalam beberapa arahan:

- 1) Arah pembangunan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah kota sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya perkotaan, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah; peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan; peningkatan kerjasama antardaerah; dan peningkatan jaminan iklim keberlanjutan usaha.
- 2) Arah pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui pembangunan karakter kota yang berbudaya; pembangunan jati diri warga kota; pembangunan nilai religi dan kesejarahan kota; peningkatan kualitas setting kebudayaan.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Berbagai agenda kelitbangan kota Palembang yang termuat nantinya disarkan kondisi dengan juga pertimbangan misi pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kota Palembang memiliki keterkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan juga mengakselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

#### 3.1.1. Arah Kebijakan Kelitbangan

Arah kebijakan kelitbangan mempertimbangkan kondisi dan keberadaan masyarakat sebagai objek pembangunan. Kondisi tersebut dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan peran bersama sebagai pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki kota Palembang. Adapun arah kebijakan kelitbangan daerah, meliputi:

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Palembang berbasis Digital.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan sosial
3. Penguatan usaha masyarakat pada sektor tersier melalui pengembangan ekonomi kreatif
4. Pendayagunaan Ekosistem Berinovasi

#### 3.1.2. Strategi Kelitbangan

Strategi menjadi upaya guna menterjemahkan berbagai aktivitas dengan menggunakan berbagai sumberdaya. Untuk itu, strategi kelitbangan mempertimbangkan empat komponen bidang rencana induk kelitbangan agar dapat selaras dengan arah kebijakan kelitbangan Kota Palembang. Strategi kelitbangan dimaksud meliputi:

Tabel 3.2  
Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan  
Kota Palembang 2018-2023

No.	Arah kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kota Palembang berbasis Digital.	Peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palembang berbasis digital
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan sosial yang berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan sosial yang berkeadilan
3.	Meningkatnya kapasitas usaha masyarakat pada sektor tersier melalui pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat pada sektor tersier melalui pengembangan ekonomi kreatif
4.	Meningkatnya pendayagunaan Ekosistem Berinovasi	Peningkatan pendayagunaan ekosistem berinovasi

Strategi yang terpetakan digunakan sebagai ukuran dalam mendisain berbagai program kelitbangan. Perumusan strategi tersebut menjadi hantaran dalam menjawab seluruh permasalahan yang diangkat dalam sebuah isu kelitbangan Kota Palembang. permasalahan sosial, pemerintah dan ekonomi yang diuraikan dalam menjelaskan berbagi isu praktik penyelenggaraan pemerintah, kemiskina, dan berbagai peluang ekonomi kreatif dalam menupaya pergerakan sektor sekunder dan tersier. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berkeadilan melalui pemanfaatan potensi ekonomi Kota Palembang, menjadi permasalahan yang dihadapi kota Palembang pada era digital saat ini.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan/Program Kegiatan

Visi	Misi	Kebutuhan Masyarakat	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan Prioritas	Tahun Pelaksanaan	Instansi Terkait
Palembang Emas Darussalam 2023	<p>1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.</p> <p>2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;</p> <p>3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Palembang berbasis Digital;</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan sosial yang berkeadilan;</li> <li>• Penguatan usaha masyarakat pada sektor tersier melalui pengembang ekonomi kreatif;</li> <li>• Pendayagunaan Ekosistem Berinovasi</li> </ul>	Sinergitas pengelolaan layanan pemerintahan digital	2020-2023	Kominfo Organisasi DPMPSTP
				Profesionalitas SDM Aparatur Pemerintah Kota	2020-2023	Organisasi BPSDM
				Peningkatan Kualitas mutu lingkungan	2020-2023	Lingkungan Perkebunan PUPR Kecamatan
				Intevensi Palayanan dasar pada kelompok masyarakat miskin	2020-2023	Pendidikan Kesehatan PUPR Dukcapil Pemberdayaan
				Intervensi sosial kelompok usaha pada keluarga miskin.	2020-2023	UMKM Pemberdayaan PUPR Kesehatan Tenaga kerja
				Pengelolaan Kawasan kumuh perkotaan	2020-2023	PUPR Kesehatan Pendidikan Pemberdayaan
				Peningkatan Kualitas hidup penduduk pada Kawasn kumuh	2020-2023	Kesehatan Pendidikan Pemberdayaan Tenaga kerja
				Penguatan kapasitas produksi kelompok Usaha masyarakat	2020-2023	UMKM Tenaga kerja Pemberdayaan

Visi	Misi	Kebutuhan Masyarakat	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan Prioritas	Tahun Pelaksanaan	Instansi Terkait
	yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi;					Industri
	4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi;			Pengembangan Infrastruktur pada sektor pariwisata	2020-2023	Pariwisata PUPR Pemuda dan Olahraga
	5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam			Penguatan kelembangaan ekonomi kreatif	2020-2023	Perekonomian UMKM Industri Pemuda
				Difusi inovasi sosial	2020-2023	Organisasi Hukum Pemerintahan Seluruh SKPD
				Penguatan inovasi tatakelola	2020-2023	Organisasi Pemerintahan Hukum
				Inkubasi bisnis wirausaha sosial	2020-2023	UMKM Industri Pemberdayaan Kominfo

### 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan

Tabel 3.4.  
Program/ Kegiatan Prioritas Kelitbangan Kota Palembang

No	Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator Capaian kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Instansi		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pelak- sana	Terkait
	Sinergitas pengelolaan layanan pemerintahan digital	Naskah Kebijakan	n/a	n/a	Penelitian Interpropabilitas aplikasi layanan pemerintah daerah	Kajian Pengembangan layanan elektronik pemerintah Kota Palembang		Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan layanan elektronik	Litbang	Kominfo Organisasi DPMPSTP
				1 Naskah	1 Naskah		1 Naskah			
		Jenis Layanan	n/a	n/a	Intergrasi Aplikasi Layanan elektronik	Pengintergrasi Aplikasi layanan elektronik	Pengintergrasi Aplikasi layanan elektronik	Pengintergrasi Aplikasi layanan elektronik		
			n/a	n/a	10 Jenis Layanan	20 Jenis Layanan	35 Jenis Layanan	40 Layanan		
	Profesionalitas Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kota	Naskah Kebijakan	n/a	n/a		Penelitian Evaluasi kebutuhan jabatan fungsional Pemerintah Kota Palembang		Kajian Penyelegaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Palembang	Litbang	Organisasi BPSDM Lingkungan
			n/a	n/a		1 Naskah		1 Naskah		
		Naskah Rancangan regulasi	n/a	n/a	Kajian penataan organisasi perangkat daerah Kota Palembang		Kajian tentang Peta Bisnis Proses dan Budaya kerja Pemerintah			

No	Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator Capaian kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Instansi		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pelak- sana	Terkait
			n/a	n/a	1 Naskah Regulasi		1 Naskah			
	Peningkatan Kualitas mutu lingkungan	Naskah Kebijakan	n/a	n/a	Penelitian kualitas lingkungan Kota Palembang	Kajian Mitigasi bencana lingkungan dan peran para pemangku kepetingan		Evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Litbang	Lingkungan Perkebunan PUPR Kecamatan
n/a			n/a	1 Naskah	1 naskah		1 Naskah			
		Forum Mitigasi	n/a	n/a	Forum komunikasi mitigasi bencana lingkungan hidup daerah	Forum komunikasi Mitigasi bencana lingkungan hidup daerah	Forum komunikasi Mitigasi bencana lingkungan hidup daerah	Forum komunikasi Mitigasi bencana lingkungan hidup daerah		
n/a			n/a	2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum			
	Intevensi Palayanan dasar pada kelompok masyarakat miskin	Naskah Kebijakan	n/a	n/a	Penelitian Akses Masyarakat pra sejahtera dalam merima layanan dasar	n/a	n/a	Penelitian Evaluasi Penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat Pra sejahtera	Litbang	Pendidikan Kesehatan PUPR Dukcapil Pemberdayaan
			n/a	n/a	1 naskah Kebijakan			1 naskah Kebijakan		
2	Intervensi sosial kelompok usaha pada keluarga miskin.	Naskah kebijakan	n/a	n/a	Penelitian Intervensi Kebijakan dalam Aktivitas berusaha pada Masyarakat Pra Sejahtera	Pengembangan Masyarkat Perkotaan	Evaluasi perkembangan potensi pada keluarga Penerima manfaat kebijakan sosial		Litbang	UMKM Pemberdayaan PUPR Kesehatan Tenaga kerja
			n/a	n/a	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah			

No	Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator Capaian kegiatan	Tahun Pelaksanaan						Instansi	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pelak- sana	Terkait
		Fasilitasi/ pendampingan	n/a	n/a	Pendampingan berusaha pada Kelompok keluarga Prasejahteran	Pendampingan berusaha pada Kelompok keluarga Prasejahteran	Pendampingan berusaha pada Kelompok keluarga Prasejahteran	Pendampingan berusaha pada Kelompok keluarga Prasejahteran	UMKM	
			n/a	n/a	20 Kelompok	30 Kelompok	60 Kelompok	80 Kelompok		
	Pengelolaan Kawasan kumuh perkotaan	Naskah Kebijakan	n/a	n/a	Penelitian Potensi Pengembangan Utilitas Kawasan Kumuh	Konsep Pembinaan Masyarakat Pra Sejahtera Pada Kawasan Kumuh	n/a	Evaluasi Penataan ruang pada Kawasan Kumuh	Litbang	PUPR Kesehatan Pendidikan Pemberdayaan
n/a			n/a	Naskah Kebijakan	Naskah Kebijakan		Naskah Kebijakan	PUPR		
n/a		Kampung Kumuh/RT	n/a	n/a	Kampung Pintar Bantaran Sungai	Kampung Pintar Bantaran Sungai	Kampung Pintar Bantaran Sungai	Kampung Pintar Bantaran Sungai		
			n/a	n/a	5 RT	7 RT	14 RT	28 RT		
	Peningkatan Kulitas hidup penduduk pada Kawasn kumuh	Naskah Kebijakan/ Regulasi	n/a	n/a	Potensi Pengembangan Utilitas Wilayah Kumuh Kota Palembang	n/a	Pemetaan Kondisi Kehidupan Penduduk pada Kawasan Kumuh	Penelitian Akses penerimaan layanan masyarakat pada Kawasan Kumuh	Litbang	Kesehatan Pendidikan Pemberdayaan Tenaga kerja
n/a			n/a	Naskah Regulasi		Naskah Kebijakan	Naskah Kebijakan			
3	Penguatan kapasitas produksi kelompok Usaha masyarakat	Naskah Kebijakan	n/a	n/a	Penelitian Pendapatan asli daerah dari UMKM Kuliner	Penelitian Kemampuan berusaha UMKM	Evaluasi permodalan terhadap UMKM Kota Palembang	Model Pemberdayaan UMKM	Litbang	UMKM Tenaga kerja Pemberdayaan Industri
			n/a	n/a	Naskah kebijakan	Naskah kebijakan	Naskah kebijakan	Naskah kebijakan		

No	Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator Capaian kegiatan	Tahun Pelaksanaan						Instansi	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pelak- sana	Terkait
	Pengembangan Infrastruktur pada sektor pariwisata	Naskah Kebijakan/ Regulasi	n/a	n/a	Kajian Pengembangan Kawasan Budaya	n/a	Kajian Dampak Sport tourism pada peningkatan Kesejahteraan masyarakat	Evaluasi kebijakan Kepariwisatan Kota Palembang	Litbang	Pariwisata PUPR Pemuda dan Olah Raga
			n/a	n/a	Naskah Regulasi		Naskah Kebijakan			
	Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif		n/a	n/a	Palembang Digital Creator ver 1.0	Palembang Digital Creator ver 2.0	Palembang Digital Creator ver 3.0	Palembang Digital Creator ver 5.0	Litbang	Perekonomian UMKM Industri Pemuda
			n/a	n/a	Konten creator	Konten creator	Konten creator	Konten creator		
Inovasi dan Pengembangan IPTEK										
	Difusi inovasi sosial	Inovasi	n/a	n/a	Replikasi Inovasi Daerah	Replikasi Inovasi Daerah	Replikasi Inovasi Daerah	Replikasi Inovasi Daerah	Litbang	Organisasi Hukum Pemerintahan Seluruh SKPD
			n/a	n/a	7 Inovasi	12 Inovasi	16 Inovasi	24 Inovasi		
	Penguatan inovasi tatakelola	Penilaian	n/a	n/a	Penyelenggaraan Penilaian dan pengukuran Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Penilaian dan pengukuran Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Penilaian dan pengukuran Inovasi Daerah	Penyelenggaraan Penilaian dan pengukuran Inovasi Daerah	Litbang	Organisasi Pemerintahan Hukum UMKM Industri Pemberdayaan
			n/a	n/a	1 Penyelenggaraan	1 Penyelenggaraan	1 Penyelenggaraan	1 Penyelenggaraan		
		Forum Kolaborasi/ kebijakan	n/a	n/a	Forum kolaborasi inovasi Daerah	Forum kolaborasi inovasi Daerah	Forum kolaborasi inovasi Daerah	Forum kolaborasi inovasi Daerah	Litbang	UMKM Industri Pemberdayaan Kominfo
			n/a	n/a	2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum		
	Inkubasi bisnis wirausaha sosial	Kelas Digital	n/a	n/a	Kelas Digital Bisnis	Kelas Digital Bisnis	Kelas Digital Bisnis	Kelas Digital Bisnis	Litbang	UMKM Industri Pemberdayaan Kominfo

No	Program/ Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator Capaian kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Instansi		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pelak- sana	Terkait
			n/a	n/a	3 Kelas	3 Kelas	3 Kelas	3 Kelas		
		Eksebisi	n/a	n/a	Eksebisi Inovasi Daerah	Eksebisi Inovasi Daerah	Eksebisi Inovasi Daerah	Eksebisi Inovasi Daerah		
			n/a	n/a	1 eksebisi	1 eksebisi	1 eksebisi	1 eksebisi		

## BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

### 4.1. Kelembagaan

Kelembagaan dimaksudkan guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan berbagai agenda rencana induk kelitbangan. Untuk itu, kegiatan kelitbangan diupayakan juga dapat menjagkau serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan dan berbagai isu pembangunan kota Palembang. tuntutan stretegi pelaksanaan didapat mulai dari berkoordinasi, keterlibatan instusi, dan kerjasama dalam bersinergi guna pelaksanaan berbagai agenda kelitbangan Kota Palembang

#### 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kelitbangan Kota Palembang memerlukan kerja lintas fungsi di internal pemerintah. Kerja lintas fungsi tersebut dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap berbagai pemecahan permasalahan perkotaan hingga tuntas dan mencapai tergetnya. Koordinasi lintas fungsi mengalirkan komunikasi antar perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai tugas yang merealisasikan target kinerja pemerintahan.

Agenda rencana induk kelitbangan Kota Palembang mengupayakan keserasian kegiatan yang disusun dengan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya. kegiatan kelitbangan memerlukan langkah koordinasi guna mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan dengan membukan ruang dialog dan diskusi guna menumbuhkan pemahaman yang sama terkait dengan kegiatan serta tahapan guna pencapaian.

Kordinasi nantinya melibatkan berbagai perangkat daerah yang erat kaitanya dengan lingkup bidang yang terumuskan pada Rencana induk kelitbangan. Lingkup komunikasi dan infromatika guna pengelolaan agenda pemerintahan eketronik/digital dalam meningkatkan kapasitas digital pemerintahan. Pengembangan masyarakat miskin serta kemampuan berusahanya dan berbagai bentuk penyelenggaraan ekonomi kreatif guna menumbuhkan wirausaha yang nanti akan mengisi sektor tersie. Selain itu, kepasitas berinovasi pemerintah daerah yang menjadi instrument dayadukung guna penguatan dayaasaing daerah berbasiskan kompetensi wilayah dan masyarakatnya.

#### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Bidang Litbang pada Pemerintah Kota Palembang yang merupakan struktu perangkat kelitbangan dengan memiliki peran aktif keterlibantan pada institusi litbang lainnya. keterlibatan tersebut menjadi salah satu upaya guna menambahkan kehadiran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang diagendakan. Untuk itu, keterlibatan institusi kelitbangan lainnya di dalam ataupun diluar kota Palembang sangat penting guna sinergitas dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam penyelesaian berbagai isu dan permasalahan utama yang menjadi fokus kelitbangan kota Palembang.

Tentunya keterlibatan institusi kelitbangan dalam wilayah Kota Palembang mensinergitan kepemilikan pengetahuan. Sumber pengetahuan tersebut menjadi landasan dasar dalam menuntaskan berbagai kerangka pengambilan kebijakan guna mendukung upaya mempercepat penuntasan kinerja pemerintah. Akselerasi tersebut diupayakan dalam berbagai bentuk ide dan konsep yang disajikan guna merespon kinerja pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sinergitas perekonomian wilayah dengan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak roda perekonomian yang

didukung dengan pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan ekosistem inovasi daerah pada kota Palembang.

#### 4.1.3. Kerjasama dan Sinergi Pelaksanaan

Berbagai agenda kegiatan yang tercipta tentunya memerlukan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakannya. Untuk itu, dibutuhkan dukungan keterlibatan serta kerjasama dengan berbagai pihak guna menuntaskannya. Tuntutan saling berkolaborasi serta berkoordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi strategi yang dimanfaatkan pada rencana induk kelitbangan. Selanjutnya strategi pelaksanaan tiap agenda kegiatan diuraikan pada table dibawah ini.

Tabel 4.1  
Strategi Pelaksanaan Agenda Rencana Induk Kelitbangan

Agenda Kegiatan	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
Sinergitas pengelolaan layanan pemerintahan digital	Kominfo Bagian Organisasi DPMPTSP	Komunitas masyarakat	Pemda dengan indeks SPBE terbaik
Profesionalitas SDM Aparatur Pemerintah	Bagian Organisasi BKPSDM	KemenPAN &RB BPKSDM Provinsi	
Peningkatan Kualitas mutu Lingkungan	DLHK Dinas Pertanian PUPR Kecamatan	Kemen LH & Kemen PUPR	
Intervensi Pelayanan dasar pada kelompok masyarakat miskin	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pera KP Disdukcapil DPPPAPM Dinas Sosial	Kemensos Kemen PUPR	
Intervensi sosial kelompok usaha pada keluarga miskin	Dinas Koperasi dan UMKM DPPPAPM Dinas Pera KP Dinas Kesehatan Dinas Ketenagakerjaan	Kemensos Kemen PUPR	
Pengelolaan Kawasan kumuh perkotaan	Dinas Pera KP Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan DPPPAPM	Kemen PUPR Komunitas Lingkungan	
Peningkatan Kualitas hidup penduduk pada kawasan kumuh	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan DPPPAPM Dinas Ketenagakerjaan	Kemensos Kemen PUPR Komunitas Lingkungan	
Penguatan kapasitas produksi kelompok usaha masyarakat	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Ketenagakerjaan DPPPAPM Dinas Perindustrian	Kemen Koperasi dan UMKM Kemenparekraf	

Agenda Kegiatan	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
Pengembangan Infrastruktur pada sektor pariwisata	Dinas Pariwisata Dinas PUPR Dispora		
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	Bagian Perekonomian Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Dispora	UMKM lokal Komunitas Pemuda Komunitas ekonomi kreatif	Kemendagri Kementerian Koperasi & UMKM Kemenpora
Difusi inovasi sosial	Bagian Organisasi Bagian Hukum Bagian Tata Pemerintahan Seluruh OPD	Kemendagri Kemen PAN RB BRIN Balitbangda Provinsi	Komunitas Kreatif Masyarakat
Penguatan inovasi tata kelola	Bagian Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum	Kemendagri Kemen PAN RB BRIN Balitbangda Provinsi	
Inkubasi bisnis wirausaha	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian DPPPAPM Diskominfo	Kemendagri Kemen PAN RB BRIN	Komunitas Usaha Rintisan (strart up)

#### 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Menjamin kualitas penyelenggaraan kelitbangan pada setiap agenda yang disusun dalam Rencana induk diselenggarakan evaluasi pada tiap kegiatan. Untuk itu, agenda kelitbangan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, meliputi:

- a. Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Kota Palembang, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
- b. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan kelitbangan sebagai dasar perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi. Indikator yang digunakan dalam kelitbangan adalah:

- a. Indikator Input, digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan program.

- b. Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Indikator Keluaran (Output), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana.
- d. Indikator Hasil (Outcome), untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- e. Indikator Dampak (Impact), digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau evaluasi hasil atau pada akhir pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari kelitbangan. Indikator implementasi yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Kehadiran /keterlibatan pelaku kelitbangan dalam setiap tahapan kegiatan;
- b. Kehadiran/keterlibatan pengambil keputusan dalam setiap tahapan kegiatan;
- c. Kualitas kinerja peneliti/perekayasa;
- d. Dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan kelitbangan;
- e. Tingkat pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana, dukungan alat kerja yang memadai efektif efisien, dan produktif;
- f. Keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan;
- g. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang transparan;
- h. Mekanisme dan prosedural yang dijalankan; dan
- i. Pemecahan masalah dan saran tindaklanjut.

## BAB V PENUTUP

Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan ini disusun guna mengakselerasi berbagai pencapaian kinerja pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan memanfaatkan pengetahuan disertakan aset lainnya yang dimiliki guna mengakselerasi berbagai kinerja Pemerintah Kota Palembang. Aset pengetahuan tersebut menjadi dukungan dalam merumuskan berbagai strategi akselerasi kinerja pemerintah kota guna menuntaskan berbagai permasalahan.

Penyelenggaraan Pemerintah Kota cerdas yang memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian kinerja Kota Palembang. Dukungan kinerja tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan layanan yang terintegrasi serta berbasis digital guna memenuhi tuntutan kemudahan layanan dan meresponsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu juga penyelenggaraan kota cerdas menjadi rujukan dalam memenuhi rasa nyaman penduduk memanfaatkan ruang kawasan yang menciptakan interkasi dekat antar penduduk bersama para pemangku kepentingan di Kota Palembang.

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang terpetakan dalam Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang, kehadiran asap dan kawasan yang kurang sehat. Asap yang selalu hadir di tiap tahunnya membuat Kota Palembang memiliki kualitas udara yang buruk. Hal ini, membutuhkan kerjasama antar pemerintah yang mengelilingi Kota Palembang guna mitigasi bencana asap dalam mengupayakan penyelesaiannya bersama.

Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang menggarisbawahi permasalahan sosial dan kemampuan masyarakat kota guna peningkatan taraf hidupnya. Kawasan kumuh yang tercipta menjadi target yang disasar guna memperbaiki kemampuan masyarakat. Tentunya kepastian dalam penggunaan ruang dan kawasan merujuk pada regulasi yang harus ditegakan secara adil. Pada Kawasan kumuh terdapat pola perilaku masyarakat menjadi target untuk diperbaiki dengan dukung oleh penataan kawasannya yang menupayakan terjadi perubahan dalam masyarakat.

Selanjutnya strategi penciptaan aktivitas perekonomian menjadi bentuk intervensi Pemerintah Kota menekan angka kemiskinan. Memperhatikan visi emas Kota Palembang 2030 menjadikan sektor pariwisata menjadi penggerak roda perekonomian dengan melibatakan berbagai instrument ekonomi kreatif sebagai pondasinya. Melalui ekonomi kreatif, pemberdayaan kelompok usaha masyarakat disajikan guna memperkuat aktivitas produksi produk jasa ataupun produk lainnya. Selanjutnya, penguatan ekosistem ekonomi digital selaras dengan aktivitas kota cerdas dikolaborasikan dengan masyarakat guna pembentukannya.

Rencana Induk Kota Palembang menjadikan inovasi daerah sebagai kunci guna meningkatkan daya saing. Untuk itu, berbagai terget kinerja Pemerintah Kota sangat perlu didekatkan dengan inovasi sebagai perangkat berkerja guna mengakselerasinya. Seluruh aspek pembangunan dan penyelesaian permasalahan perkotaan didekatkan dengan cara dan ide baru yang lebih mengedepankan kolaborasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO